

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep

Risvha Indah Sari^{1*}, Nur Afiah², Masdar Ryketeng³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: risvhaindahsari27@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 15-07-20025

Revision: 01-08-2025

Published: 26-11-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.150

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep selama periode 2021–2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih berada pada kategori sangat rendah dengan rata-rata sebesar 19,49 persen. Efektivitas PAD berada dalam kategori kurang efektif dengan rata-rata 81,14 persen, meskipun menunjukkan tren peningkatan. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar –2,77 persen, dan rasio ketergantungan keuangan tercatat sangat tinggi sebesar 83,13 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa BKAD Kabupaten Pangkep masih menghadapi tantangan serius dalam upaya mencapai kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan potensi PAD, perbaikan sistem pemungutan pajak, dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah

A B S T R A C T

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Pangkep Regency during the 2021–2023 period. The analysis employs four financial ratios: Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Locally-Generated Revenue (PAD), Revenue Growth Ratio, and Financial Dependency Ratio. The research method used is descriptive quantitative, with data collected through documentation of regional financial reports. The findings indicate that the region's financial independence remains very low, with an average ratio of 19.49 percent. The effectiveness of PAD is categorized as less effective, averaging 81.14 percent, although showing an upward trend. Revenue

growth experienced a negative average rate of –2.77 percent, and the financial dependency ratio is still very high at 83.13 percent. These results suggest that BKAD of Pangkep Regency continues to face serious challenges in achieving fiscal autonomy. Therefore, it is necessary to strengthen local revenue potential, improve tax collection systems, and optimize financial management to support the successful implementation of sustainable regional autonomy.

Key word: *Financial Performance, Local Own-Source Revenue, Local Government*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Dalam era teknologi yang terus berkembang, otonomi daerah memegang peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta sumber daya secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam dan manusia, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang responsif terhadap kondisi masyarakat. Namun, di balik keleluasaan tersebut, otonomi daerah juga menuntut adanya akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

Menurut Fernandes (2022), otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam koridor hukum yang berlaku. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usman (2017) menjelaskan bahwa PAD merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari potensi daerah sendiri dan menjadi sumber pembiayaan utama kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik oleh pemerintah daerah. Idris (2017) menegaskan bahwa penilaian kinerja keuangan dilakukan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, terutama melalui analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Wulandari (2022)

menambahkan bahwa pengukuran kinerja sangat penting dalam rangka memastikan akuntabilitas penggunaan uang publik, yang tidak hanya ditinjau dari aspek transparansi, tetapi juga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, serta efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Analisis terhadap PAD menjadi sangat penting karena memberikan gambaran tentang potensi, pencapaian, serta kendala dalam optimalisasi pendapatan daerah. PAD juga berfungsi sebagai indikator strategis dalam mengukur sejauh mana daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Adelia (2023) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan melalui berbagai rasio, antara lain efektivitas, efisiensi, kemandirian, pertumbuhan, dan keserasian. Rasio-rasio ini memberikan pemahaman mendalam terkait sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Pangkep sebagai salah satu daerah otonom di Sulawesi Selatan, juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2021–2023, Kabupaten Pangkep menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi, yakni di atas 95% setiap tahunnya. Namun, fluktuasi realisasi pada tahun 2022 mengindikasikan adanya hambatan dalam pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal target anggaran dapat terealisasi, namun aspek efektivitas, pertumbuhan, dan ketergantungan fiskal masih perlu dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Bahri (2022), yang menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Pangkep pada periode 2017–2019 masih tergolong sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar 18,83 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kinerja keuangan daerah dalam periode terbaru untuk melihat apakah terjadi perbaikan signifikan, khususnya dalam hal peningkatan PAD, penguatan kemandirian fiskal, dan pengurangan ketergantungan terhadap dana eksternal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep selama tahun 2021 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, pertumbuhan pendapatan, dan rasio ketergantungan

keuangan guna mengetahui sejauh mana BKAD mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan daerah tanpa menguji hubungan antar variabel (Sugiyono, 2015). Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BKAD, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Firmansyah, 2022). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti APBD dan laporan keuangan lainnya, serta wawancara jika diperlukan sebagai pelengkap informasi (Thalib, 2022; Fadilla & Wulandari, 2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan empat rasio keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung secara terus-menerus pada bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Zuhri, M (2016) Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio (%)
2021	216.748.174.029,00	938.839.779.304,00	0	23,08
2022	205.846.851.300,00	1.079.361.802.314,00	0	19,07
2023	195.298.375.300,00	1.196.562.678.000,00	0	16,32
Rata-rata				19,49

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Rasio kemandirian keuangan BKAD Kabupaten Pangkep menurun tajam dari 23,08% pada 2021 menjadi 16,32% pada 2023, mengindikasikan melemahnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja secara mandiri. Penurunan ini mencerminkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Secara struktural, ketergantungan ini disebabkan oleh minimnya eksplorasi potensi pendapatan lokal, sementara secara teknis, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pajak masyarakat, lemahnya sistem pemungutan, dan pengawasan yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi pajak melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan basis pajak, termasuk sektor UKM dan aset daerah. Jika tidak segera dibenahi, ketergantungan fiskal akan terus menghambat pembangunan. Pola ini juga tercermin pada periode 2017–2019, di mana rasio kemandirian rata-rata hanya 18,83%, menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat kronis dan memerlukan solusi berkelanjutan.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Rasio ini dapat diibaratkan seperti nilai ujian, yang menunjukkan tingkat pencapaian pemerintah daerah terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Menurut Zuhri, M (2016) perhitungan rasio ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio (%)
2021	159.407.687.393,01	216.748.174.029,00	73,54
2022	163.602.765.323,44	205.846.851.300,00	79,47
2023	176.623.383.839,89	195.298.375.300,00	90,43
Rata-rata		81,14	

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Pangkep selama periode 2021–2023 berada pada angka 81,14 persen, yang tergolong dalam kategori *Kurang Efektif*. Hal ini menunjukkan

bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan target dan pelaksanaan pemungutan PAD, serta masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas manajemen pendapatan daerah, termasuk perbaikan sistem pendataan wajib pajak, intensifikasi pajak, dan penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio Rasio pertumbuhan pendapatan menggambarkan laju peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Semakin besar nilai rasio ini, semakin menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya. Seperti halnya pertumbuhan tinggi badan pada anak, rasio ini mencerminkan seberapa cepat pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Pundissing, R (2020) perhitungan rasio ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun	Realisasi PADt1 (Rp)	Realisasi PADt0 (Rp)	Rasio (%)
2021	159.407.687.393,01	196.530.900.657,27	-18,88
2022	163.602.765.323,44	159.407.687.393,01	2,63
2023	176.623.383.839,89	163.602.765.323,44	7,95
Rata-rata			-2,77

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Selama periode 2021–2023, rasio pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan rata-rata sebesar –2,77 persen, yang termasuk dalam kategori *Sangat Buruk*. Angka negatif ini menggambarkan belum stabilnya pendapatan daerah dan menunjukkan adanya tantangan dalam memperkuat sumber penerimaan yang berkelanjutan. Kemungkinan besar, kondisi ini disebabkan oleh lemahnya basis penerimaan serta tingginya ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap gejolak eksternal. Meskipun sempat terjadi perbaikan pada dua tahun terakhir, pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi penurunan tajam

sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan strategi fiskal yang berbasis pada potensi ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan pendapatan yang lebih berkelanjutan dan stabil.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah Pusat. Rasio ini mencerminkan belum optimalnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri. Menurut Mahmudi (2016) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep periode Tahun 2021-2023:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Periode 2021 - 2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2021	1.092.920.964.304,00	1.366.852.503.333,00	79,95
2022	1.214.517.776.314,00	1.448.114.627.614,00	83,86
2023	1.315.360.362.990,00	1.536.645.123.532,00	85,59
Rata-rata		83,13	

Sumber : Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pangkep (data diolah, 2025)

Rata-rata rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pangkep selama tiga tahun terakhir mencapai 83,13 persen, yang termasuk dalam kategori *Sangat Tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan yang terus tinggi ini menjadi indikator bahwa kemandirian fiskal daerah belum tercapai secara optimal. Ruang fiskal daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang otonom pun menjadi sangat terbatas. Kegagalan dalam meningkatkan kontribusi PAD menyebabkan struktur pendapatan tetap tidak seimbang dan menjadikan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Untuk mengurangi ketergantungan ini, diperlukan strategi penguatan PAD yang lebih serius melalui perluasan basis

pajak, pengembangan sektor unggulan daerah, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan analisis empat rasio kinerja keuangan daerah BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah dengan tren penurunan, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Sementara itu, efektivitas PAD mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan mencapai kategori cukup efektif pada 2023, meskipun rata-rata selama tiga tahun masih berada pada kategori kurang efektif. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan kondisi yang belum stabil dengan rata-rata negatif, menandakan masih rapuhnya struktur pendapatan daerah. Di sisi lain, rasio ketergantungan keuangan yang tetap tinggi memperkuat kesimpulan bahwa otonomi fiskal Kabupaten Pangkep belum terwujud secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam memperkuat basis PAD, meningkatkan efisiensi fiskal, serta mendorong reformasi kelembagaan dan kebijakan fiskal untuk mencapai kemandirian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, diperoleh rata-rata rasio kemandirian sebesar 19,49 persen. Nilai tersebut berada dalam kategori rendah sekali yang berarti pola hubungan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih bersifat instruktif, di mana pemerintah pusat masih sangat dominan dalam pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) pada BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, rata-rata rasio efektivitas PAD selama periode tersebut sebesar 81,14 persen, yang masuk dalam kategori kurang efektif. Ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber PAD perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, diperoleh rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar –2,77 persen, tergolong dalam kategori sangat buruk karena berada pada persentase negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan pendapatan daerah, meskipun pada tahun-tahun selanjutnya terdapat perbaikan. Ketidakstabilan ini

mencerminkan bahwa kinerja fiskal belum pulih secara menyeluruh dan struktur pendapatan masih rentan terhadap tekanan eksternal.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, diperoleh Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 83,13 persen, yang berada dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan yang tinggi membatasi ruang fiskal daerah untuk menyusun kebijakan belanja secara mandiri, sehingga memperlemah posisi otonomi fiskal yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan keempat rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep belum optimal, terutama dalam hal kemandirian keuangan dan pertumbuhan pendapatan yang masih tergolong rendah. Meskipun efektivitas pengelolaan PAD sudah mulai menunjukkan tren positif, namun ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan potensi PAD dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah. [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/15198/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/15198/)
- Apriani, D., Politeknik, Y., & Sorong, P. (2021). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Components Of Local Government Financial Reports. [Https://Www.Poltekstpaul.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jakp/Article/View/667](https://Www.Poltekstpaul.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jakp/Article/View/667)
- Asri, G. S. W. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/7362/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/7362/)
- Budianto, A., Diskominfo, S., & Magelang, K. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. [Https://Pusaka-V1.Magelangkab.Go.Id/Assets/Blog/Images/Upload/Analisa_Kinerja_Kuangan_Pem erintah_Kabupaten_Magelang_2016-2020.Pdf](https://Pusaka-V1.Magelangkab.Go.Id/Assets/Blog/Images/Upload/Analisa_Kinerja_Kuangan_Pem erintah_Kabupaten_Magelang_2016-2020.Pdf)
- Deswira Badan, A., Daerah, K., & Tanah Datar, K. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. 17(1), 72–88. [Https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jam](https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jam)
- Devi, Y. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. [Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/228480835.Pdf](https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/228480835.Pdf)
- Fadilla, Annisa Rizky, & Wulandari, Putri Ayu. (2023). Literature Review Analisis Data

- Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
<https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 198–209.
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/102>
- Firmansyah, D., Pasim Sukabumi, S., & Al Fath Sukabumi, S. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Giovana Putri, B., Manajemen, J., Malangkucecwara Malang, S., & Munfaqiroh, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 214–226.
<http://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/1563>
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). Strategi Komunikasi Humas Dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi Apbd Di Dprd Sumatera Utara. <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/22157/1/188530070%20-%20apriadi%20-%20fulltext.pdf>
- <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/64356>
- Idris, M. (2017). Kinerja Keuangan Daerah. <http://eprints.ipdn.ac.id/6043/1/Kinerja%20keuangan%20daerah.pdf>
- Ijtihad, R. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/gara>
- Irnawati, Saripuddin D, & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403–416. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jmmni/article/view/3009>
- Latifa, H. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Kosmetik. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 63–76.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.155>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Upp Stim Ykpn
- Manumpil, A., & Magda, F. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan Apbd Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 157–166.
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3027>
- Marlianita, Yulistiani. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*. <https://jurnal.polban.ac.id/tarj/article/view/2357>
- Marwati, S., & Pratiwi, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Kebumen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(2). <https://repository.unimugo.ac.id/2948/>

- Muhammad Saifrizal, K. Di. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3). <https://Ojs.Ukb.Ac.Id/Index.Php/Jmabis/Article/View/764>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dinamika_Pembangunan/Article/Viewfile/22844/15488
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurika, D. (2025). Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(4), 234–250. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i4.125>
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 173-183. <https://Www.Journal.Stiemb.Ac.Id/Index.Php/Mea/Article/View/3662>
- Pongoh, M. (2015). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Bumi Resources Tbk. *Emba*, 1(3), 669–679. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/2135>
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 215–219. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.117>
- Pratama, M. R., Yahya, B., & Malazia, S. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kab. Sleman Tahun 2018-2020. *Musytari*, 2(12). <https://Ejournal.Warunayama.Org/Index.Php/Musytarineraca/Article/View/1601>
- Pundissing, R., Pagiu, C., Kristen, U., Toraja, I., Kunci, K., Keuangan, K., Daerah, K., & Kinerja, R. (2020). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal Of Accounting*, 2(2). <http://Ojs.Ukipaulus.Ac.Id/Index.Php/Pja/Article/View/390>
- Puteri, N. D., Putricia, N. D., Arsyanti, K., Putricia, N. D., Hakim, L., & Pratiwi, V. (2025). Analisis Kelayakan Butir Soal Pada Handout Akuntansi Keuangan Dana Kas Kecil Berbasis E-Book Menggunakan Software Anates. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 205–214. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.108>
- Putra, & Hidayat. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jes/Article/View/3526>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64-74.

- <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/jmbe/article/download/1901/1856/7727>
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71-85. <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/download/373/292>
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. (*Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*), 8(2), 134–143. <https://jurnal.stie-sampit.ac.id/index.php/ojs/article/view/161>
- Ramadhan, F., Kabupaten, A., Provinsi, B., Selatan, S., Studi, P., & Publik, K. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. <http://eprints.ipdn.ac.id/8620/>
- Randria, F. (2016). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 86–98. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3846>
- Rudiwanto, A. (2020). Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Pegadaian (Persero) Dengan Menggunakan Rasio Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter>
- Ryketeng, M., Oktaviah, N., & Syachbrani, W. (2023). Yume : Journal Of Management Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang. In *Yume : Journal Of Management* (Vol. 6, Issue 2). <https://www.journal.steamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/4343>
- Saifrizal, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202-211.
- Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika*, 17(2), 115–121. https://www.academia.edu/download/103129818/Rasio_20keuangan_20untuk_20menilai_20kinerja_20keuangan.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Reaserch And Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Vol. 7, Issue 1). <https://core.ac.uk/download/pdf/236655267.pdf>
- Tandiasik, Y., Toatubun, N., & Thane, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 98–110. <https://doi.org/10.55049/jeb.V15i2.230>
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/Seandanan.V2i1.29>
- Tjahjono, A., & Oktaviani, R. (2016). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian

- Keuangan Daerah Di Provinsi Diy. Jurnal Kajian Bisnis, 24(1), 25–34.
[Http://Jurnal.Stieww.Ac.Id/Index.Php/Jkb/Article/View/156](http://Jurnal.Stieww.Ac.Id/Index.Php/Jkb/Article/View/156)
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). [Https://Journals.Telkomuniversity.Ac.Id/Jaf/Article/View/902](https://Journals.Telkomuniversity.Ac.Id/Jaf/Article/View/902)
- Vebiani, D., & Dian Hardiana, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat). In Journal Of Finance, Entrepreneurship, And Accounting Education Research (Vol. 1, Issue 1). [Https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Fineteach/Article/View/48137](https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Fineteach/Article/View/48137)
- Wulandari, Sri Oktaviani, Thoyib, M., & Mubarak, Husni. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Transformation. [Http://Jurnal.Syntaxtransformation.Co.Id/Index.Php/Jst/Article/View/593](http://Jurnal.Syntaxtransformation.Co.Id/Index.Php/Jst/Article/View/593)
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2). [Https://Jurnal.Unived.Ac.Id/Index.Php/Er/Article/View/284](https://Jurnal.Unived.Ac.Id/Index.Php/Er/Article/View/284)